



b.2/c 41
ISSN 1829-8079

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 9 No. 3, September 2012

Daerah Pemekaran Di Provinsi Sumatera Utara: Bagaimana Pengelolaannya?
(Herie Saksono)

Tinjauan Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Sebagai Prakondisi Dan Langkah Strategis Dalam Rangka Penguatan Dan Pematapan Otonomi Daerah Ke Depan
(Teguh Narutomo)

Perubahan Iklim Dan Upaya Mitigasinya Melalui Pengelolaan Hutan Di Indonesia
(Ahmad Dany Sunandar)

Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin Dan Pendorong Remaja Pengguna Situs Internet Dan Televisi Terhadap Perilaku Seksual Di SMA Methodist 4 Medan
(Lusiana Gultom, Ritha F. Dalimunthe, Lodiana Ayu)

Evaluasi Kemampuan Guru SD Mengelola Pembelajaran Kooperatif di Sumatera
(Jonni Sitorus)

Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Sekolah
(Syafiqul Sagala, Dwi Endah Purwanti, Dumora Jenny, Jonni Sitorus)

Pengetahuan Dan Keperdulian Terhadap Perubahan Iklim Pada Masyarakat Di Kota Medan, Sumatera Utara
(Fotarisman Zaluchu)

Evaluasi Trafiking Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2004
(Chairul Bariah)

Diterbitkan oleh:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara

Inovasi	Vol. 9	No. 3	Hal. 155-229	Medan September 2012	ISSN 1829 - 8079
---------	--------	-------	-----------------	-------------------------	---------------------

Terakreditasi sebagai Majalah Berkala Ilmiah berdasarkan Keputusan Kepala LIP Nomor. 482/D/2011 Tanggal 12 April 2011



THE
Character Building
UNIVERSITY

PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN SEKOLAH

(EMPOWERMENT SCHOOL COMMITTEE IN IMPROVING THE QUALITY OF SCHOOLMANAGEMENT)

Syaiful Sagala*, Dwi Endah Purwanti**, Dumora Jenny**, Jonni Sitorus**

* Universitas Negeri Medan

**Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Jln. Sisingamangaraja No. 198 Medan

Email : dumora_jenny@yahoo.com

Naskah masuk : 10 Juni 2012 Naskah diterima : 2 Juli 2012

ABSTRAK

Pada umumnya saat ini komite sekolah belum memenuhi aspirasi masyarakat dan belum banyak membantu dalam peningkatan kualitas manajemen sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kelembagaan komite sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas manajemen sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Populasi penelitian adalah semua anggota komite sekolah tingkat SMP di Sumatera Utara. Sampel penelitian diambil dari 3 kabupaten/kota yaitu: Kota Medan, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Batubara. Tiap kabupaten/kota diambil sebanyak 7 sekolah. Subjek penelitian adalah anggota komite sekolah sebanyak 3 orang per sekolah. Metode penelitian yang dilakukan yaitu: survey, wawancara dan studi literatur. Instrumen yang dipakai dalam mengambil data berupa: angket/kuesioner dan panduan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu: deskripsi, kualitatif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan anggota komite sekolah sebagian besar adalah sarjana (54,39%), dan pada umumnya pekerjaannya adalah guru (49%). Pada umumnya fasilitas dan SDM dari komite sekolah masih relatif kurang dan kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pemberdayaan komite sekolah belum maksimum, ditunjukkan dengan masih banyaknya anggota komite sekolah belum pernah mengikuti pelatihan/workshop tentang masalah komite sekolah. Pengetahuan anggota komite sekolah tentang peran dan fungsi serta implikasinya di lapangan perlu ditingkatkan. Telah disusun suatu modul/materi dalam meningkatkan pengetahuan komite dalam rangka pemberdayaannya. Diharapkan pemerintah (Gubernur Sumatera Utara) melalui Dinas pendidikan melakukan pembinaan/pemberdayaan komite sekolah, yakni dengan meningkatkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Kata kunci: komite sekolah, manajemen sekolah, mutu pendidikan

ABSTRACT

In general, the current school committee has not met the aspirations of the people and not much help in improving the quality of school management. This study aims to determine the institutional characteristics of the school committee in carrying out its roles and functions to improve the quality of education and the quality of school management at the unit level of education. The study population is all members of the committee for junior high schools in North Sumatra. The samples taken from three

counties / cities: Medan City, Tebing Tinggi City and Batubara County. Each county/city was taken by 7 schools. Subjects were members of the school committee of 3 people per school. The research methods have been done were: surveys, interviews and literature studies. Instruments used in taking the data: questionnaire and interview guide. Data analysis techniques, namely: a description, a qualitative, and content analysis. The results showed the level of education of the school committee members are mostly undergraduate (54.39%), and in general his work is a teacher (49%). In general, facilities and human resources of school committee is still relatively low and the activities carried out still needs to be improved in their functions and roles. Empowerment of the school committee has not the maximum, indicated by the number of members of the school committee still has not attended training / workshop on the subject of the school committee. School committee members' knowledge about the role and function and its implications in the field needs to be improved. Has compiled a module / materials to increase knowledge of the committee in order to empowerment. It is expected the government (the Governor of North Sumatra) through the Department of Education to provide guidance / empowerment of the school committee, namely to enhance the role and function in improving the quality of education at the level of the education.

Keywords: school committee, school management, quality of education

PENDAHULUAN

Dalam paradigma baru (*new paradigm*) proses penyelenggaraan pendidikan menggunakan pola manajemen yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang dalam aspek teknis edukatif dikenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Hal pokok penerapan MBS adalah otonomi pengelolaan sekolah dan pemberdayaan seluruh sumberdaya sekolah. Salah satu sumberdaya sekolah yang potensial adalah masyarakat sekitar sekolah dan orang tua peserta didik. Untuk itu, orangtua siswa diberi ruang untuk ikut membantu meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Keikutsertaan orang tua dan masyarakat dilakukan melalui sistem yang teratur, dan wadah yang menghimpunnya. Dengan terbitnya Kepmendiknas No. 044/U/2002, Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat (Sagala, 2007).

Organisasi Komite Sekolah berfungsi sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Untuk itu orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah bergabung dalam Komite Sekolah juga harus memahami pola manajemen sekolah yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan ini, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hirarki dengan lembaga pemerintahan. Adapun tujuan Komite Sekolah yaitu: mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan

tanggungjawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Tilaar, 2004).

Berdasarkan studi pendahuluan pada tahun 2008 di Serdang Bedagai, terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan organisasi Komite Sekolah yaitu: 1) penguatan organisasi Komite Sekolah; 2) penguatan peran dan fungsi Komite Sekolah dalam manajemen sekolah; 3) peningkatan kapasitas pengurus Komite Sekolah berkaitan dengan manajemen sekolah; dan 4) dukungan yang kuat dari Komite Sekolah terhadap program sekolah.

Secara umum keterwakilan lapisan masyarakat dalam kepengurusan Komite Sekolah belum sepenuhnya memenuhi aspirasi masyarakat, karena ada diantaranya hanya merubah nama BP3 menjadi Komite Sekolah, sedangkan pengurusnya tetap. Selain itu keberagaman latar belakang pendidikan dan status sosial ekonomi pengurus komite sekolah dapat mempengaruhi kinerjanya. Sehingga pengurus Komite Sekolah masih memerlukan peningkatan wawasan dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsinya. Tidak mengherankan bila keberadaan organisasi sekolah tersebut pada sebagian sekolah dirasakan kurang ada manfaatnya, karena keterbatasan peran dan fungsinya. Oleh sebab itu segera dilakukan upaya pemberdayaan Komite Sekolah untuk peningkatan kemampuan mengelola organisasi sekaligus peningkatan kualitas manajemen sekolah.

Pada dasarnya upaya peningkatan kapasitas pengurus Komite Sekolah telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, Dewan Pendidikan, dan lembaga lainnya. Namun karena berbagai alasan, kegiatan tersebut belum banyak membantu meningkatkan kualitas peran dan fungsi Komite Sekolah. Kegiatan seperti ini tentu membutuhkan dana yang besar dan jumlah pengurus Komite Sekolah yang dilibatkan sangat terbatas, oleh sebab itu diperlukan model pelatihan yang efektif untuk diterapkan serta dapat menjangkau banyak pengurus, dan pemberian materi pelatihan yang efektif, efisien, dan berdaya tarik dengan menggunakan Modul yang mudah dipahami.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kelembagaan Komite Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sumatera Utara, mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan mengidentifikasi materi pokok (konten) dalam pemberdayaan Komite Sekolah yang belum dipahami oleh anggota komite. Sehingga dari hasil identifikasi masalah tersebut akan disusun modul peningkatan kemampuan organisasi Komite Sekolah dan modul peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah tingkat SMP di Sumatera Utara dengan sasaran semua anggota Komite Sekolah di tingkat SMP. Penelitian dilaksanakan dilakukan pada bulan September dan Oktober 2011.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua anggota Komite Sekolah di tingkat SMP di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh data penelitian, maka teknik sampling tahap pertama dengan cara *cluster sampling* dengan mengambil 3 (tiga) wilayah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Adapun wilayah yang menjadi sampel penelitian yaitu: Kota Medan, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Batubara. Tahap kedua, diambil secara *purposive sampling* sebanyak tujuh (7) sekolah untuk setiap wilayah sasaran penelitian. Tahap ketiga, setiap sekolah diambil sebanyak tiga (3) orang pengurus/anggota komite sekolah yang merupakan responden penelitian. Jadi jumlah sampel target yang diambil untuk setiap wilayah kota/kabupaten yaitu sebanyak 7×3 orang = 21 orang responden pengurus/ anggota Komite Sekolah tingkat SMP.

Data Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan dengan cara yang ditempuh yaitu:

1. Metode survey menggunakan Angket, untuk menjangkau data tentang Profil Komite Sekolah dan Pemberdayaan Komite Sekolah
2. Metode Wawancara dengan pendekatan Focus Group Discussion (FGD), untuk menjangkau data tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
3. Metode Studi Literatur, untuk mengembangkan Modul (bahan) untuk pemberdayaan Komite Sekolah

Teknik Pengambilan Data

Data dijangkau dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian berupa kuesioner/angket, panduan wawancara (FGD) serta pencatatan dokumen/literatur. Angket digunakan untuk menjangkau data tentang Profil Komite Sekolah dan Pemberdayaan Komite Sekolah. Panduan wawancara (FGD) digunakan untuk menjangkau data tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing. Pencatatan dokumen/literatur digunakan untuk mengembangkan Modul (bahan) dalam meningkatkan materi pemberdayaan Komite Sekolah.

Dalam penyusunan modul dilakukan lima (5) tahapan yaitu:

- a. Tahap pertama analisis kebutuhan dalam pemberdayaan Komite Sekolah,
- b. Tahap kedua dilakukan analisis konten/isi terhadap berbagai materi pemberdayaan Komite Sekolah,
- c. Tahap ketiga mencari/menyusun Modul pemberdayaan Komite Sekolah,
- d. Tahap keempat meminta pendapat (expert judgment) dari para ahli, dan
- e. Tahap kelima perbaikan Modul yang disusun berdasarkan masukan dari *expert judgment*.

Teknik Analisis Data

Data dijangkau dengan menggunakan alat ukur serta dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun teknis analisis yang dilakukan yaitu:

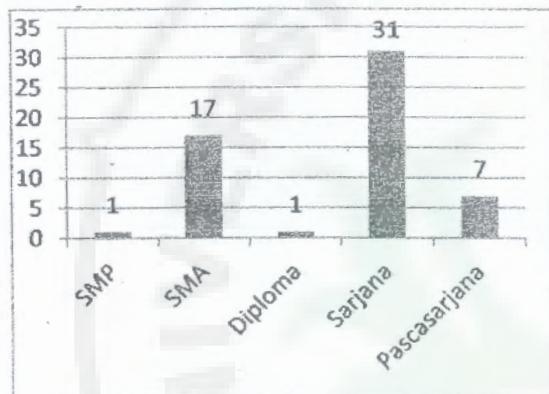
1. Analisis Deskriptif untuk menggambarkan Profil Komite Sekolah dan Pemberdayaan Komite Sekolah.
2. Analisis Kualitatif untuk menggambarkan Peran dan Fungsi Komite Sekolah yang telah dilakukan selama ini
3. Analisis Konten untuk menyusun Modul Pemberdayaan Komite Sekolah.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Komite Sekolah

A. Profil Responden (Pengurus/Anggota Komite Sekolah)

Responden penelitian yang menjadi sampel penelitian pada 3 kota/kabupaten berjumlah 57 orang dengan rincian sebanyak 20 orang dari Kota Medan, sebanyak 18 orang dari Kota Tebing Tinggi dan sebanyak 19 orang dari Kabupaten Batubara. Bila ditinjau berdasarkan tingkat Pendidikan Pengurus/Anggota Komite Sekolah tersaji pada gambar 1.

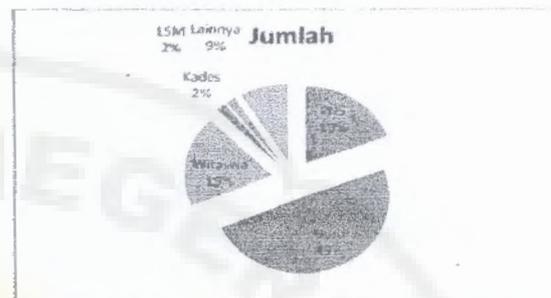


Gambar 1. Tingkat Pendidikan Pengurus/Anggota Komite Sekolah

Berdasarkan gambar 1, sebagian besar (31 orang atau 54,39%) pengurus/anggota Komite Sekolah di SMP telah berpendidikan Sarjana (S-1). Bila ditinjau jumlah anggota Komite Sekolah yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 25 orang.

Kepengurusan komite sekolah berasal dari berbagai unsur perwakilan seperti: tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dewan guru, pengusaha, perwakilan orang tua siswa, tokoh agama, pemuda, LSM, alumni dan perwakilan

siswa. Struktur kepengurusan komite sekolah pada umumnya terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.



Gambar 2. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Bila ditinjau dari jenis pekerjaan pengurus/anggota Komite Sekolah, disajikan seperti pada gambar 2. Pekerjaan pengurus/anggota Komite Sekolah terdiri sebagai guru sebanyak 28 orang (49%), PNS (selain guru) sebanyak 11 orang (19%), wiraswasta sebanyak 11 orang (19%), dan kepala sekolah ada 1 orang (2%). Pengurus/anggota Komite Sekolah yang berasal dari LSM ada 1 orang (2%) dan yang memiliki pekerjaan lainnya ada sebanyak 5 orang (9%). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa yang paling banyak pengurus/anggota Komite Sekolah mempunyai pekerjaan sebagai guru.

B. Evaluasi Diri Komite Sekolah

Berdasarkan data yang diberikan oleh responden tentang fasilitas dan SDM dari kepengurusan Komite Sekolah dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Komite Sekolah telah melakukan evaluasi diri. Bila diuraikan secara rinci tentang fasilitas dan SDM dari kepengurusan Komite Sekolah diperoleh skor dari setiap aspek yang dinilai seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Skor Rata-rata Fasilitas dan SDM Komite Sekolah

Fasilitas dan SDM	Skor Rata-rata
1. Tenaga administrasi dan keuangan	1.48
2. Ruang kantor khusus	1.19
3. Meja kursi rapat	1.26
4. Papan tulis dan papan data	1.26
5. Papan struktur organisasi	1.33
6. Agenda dan arsip surat masuk/keluar	1.42
7. Stempel dan bak stempel Komite Sekolah	1.30
8. Buku daftar hadir rapat	1.31
9. Buku notulensi rapat	1.39
10. Buku kas	1.29
11. Rekening bank	1.23

12. Dokumen RAPBS/APBS	1.36
13. Dokumen AD/ART Komite Sekolah	1.24
14. Buku Panduan Umum Komite Sekolah	1.22
15. Buku Acuan Operasional Komite Sekolah	1.31
16. Salinan Kepmendiknas No. 044/U/2002	1.40
17. Salinan UU No. 20 Tahun 2003	1.21
18. Data sekolah	1.30
19. Data orang tua siswa	1.30
20. Data Pengusaha sekitar sekolah	1.19
Fasilitas dan SDM	Skor Rata-rata
21. Data hasil belajar siswa	1.30
22. Papan nama Komite Sekolah	0.96
23. Kop surat khusus Komite Sekolah	1.33
24. Rencana Pengembangan Sekolah	1.44
Rata-rata	1.29

Sumber: Hasil Survey 2011

Skor rata-rata yang paling kecil yaitu komponen Papan Nama Komite Sekolah sebesar 0,96 dan yang paling tinggi yaitu Tenaga Administrasi dan Keuangan yaitu sebesar 1,48. Ini bermakna bahwa Papan Nama Komite Sekolah untuk tiap sekolah tersedia namun tidak lengkap, sementara Tenaga Administrasi dan Keuangan Komite Sekolah pada umumnya ada namun merangkap dengan tenaga administrasi dan keuangan sekolah. Hal ini terjadi karena kegiatan dari Komite Sekolah belum optimal, sehingga tenaga administrasi dan keuangan belum terlalu dibutuhkan. Untuk komponen yang lain dari 24 aspek yang diminta keterangan/informasi dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

C. Kegiatan Operasional Komite Sekolah

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh dari kepengurusan Komite Sekolah, kegiatan yang paling sering dilakukan yaitu penggalangan dana masyarakat untuk dijadikan dana sekolah (pertanyaan no. 18) dengan skor rata-rata sebesar 2,72. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang paling dipahami oleh Komite Sekolah yaitu menggalang dana dari masyarakat untuk keberlangsungan program dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan operasional yang paling sedikit/jarang dilakukan yaitu memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah dilakukan verifikasi dalam rapat pleno. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus/anggota Komite Sekolah kurang melakukan komunikasi tentang RAPBS yang disusun oleh sekolah.

Komunikasi yang jarang antara pengurus/anggota Komite Sekolah dengan pihak sekolah, menyebabkan program-program yang disusun oleh sekolah atau Komite Sekolah kurang dipahami dan kurang saling mendukung.

Akibatnya keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang satuan pendidikan (sekolah) kurang berjalan secara optimal. Selengkapnya data tentang kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Komite Sekolah disajikan pada lampiran.

D. Pemherdayaan Komite Sekolah

Untuk mengungkap masalah pemberdayaan Komite Sekolah didasarkan atas data/informasi yang dijaring melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan pendekatan FGD bersama pengurus Komite Sekolah di tiga wilayah penelitian. Adapun beberapa hasil wawancara dapat disajikan sebagai berikut:

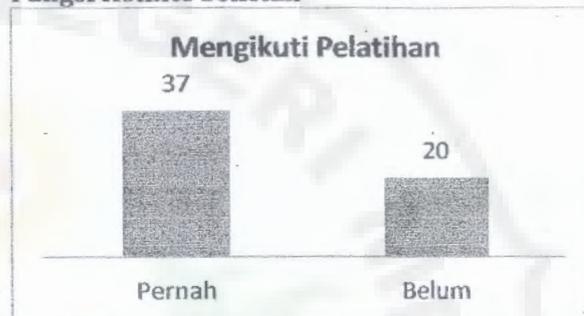
- a. Pada umumnya setiap sekolah membentuk Komite Sekolah setelah turun Keputusan Menteri tentang pembubaran BP3 dan pembentukan Komite Sekolah dengan nomor Kepmendiknas No. 044//U/2002.
- b. Proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan mengundang orangtua/wali siswa beserta unsur lain yang peduli terhadap pendidikan seperti: tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dewan guru dan lainnya. Setelah forum memenuhi, dilakukan pemilihan kepengurusan dengan memilih ketua. Pemilihan ketua dilakukan secara formatur dan ketua yang terpilih yang menyusun keanggotaan kepengurusan komite sekolah.
- c. Rapat-rapat formal yang dilakukan pengurus komite sekolah dengan orangtua siswa baru berkisar antara 1 sampai 3 kali selama setahun dan rata-rata hanya sebanyak 2 kali setahun. Waktu rapat pada umumnya pada awal tahun ajaran dan menjelang ujian nasional.

- d. Hanya sebagian kecil pengurus/anggota Komite Sekolah yang kooperatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Misalnya, pada MTsN 2 Medan, pengurus/anggota Komite Sekolah mencari dana untuk membangun ruang MGMP yang diperuntukkan bagi para guru dalam berdiskusi, pada SMPN 9 Tebing Tinggi, pengurus/anggota Komite Sekolah ikut bertanggungjawab untuk memantau anak-anak yang tidak masuk sekolah (bolos) pada jam sekolah. Sementara pengurus/anggota Komite Sekolah lainnya, belum mempunyai program yang konkrit menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- e. Materi dalam rapat Komite Sekolah yang dibahas yaitu meliputi: persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN), persentase kelulusan siswa kelas IX, prosedur pendaftaran dan penerimaan calon siswa baru, penjelasan tentang program kerja sekolah, membicarakan masalah kesejahteraan dan kinerja guru, pelaksanaan les tambahan bagi siswa/ siswi, dan hal lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.
- f. Dari hasil wawancara, hampir semua pengurus/anggota Komite Sekolah tidak paham tentang peran dan fungsinya sebagaimana diuraikan dalam Kepmen No. 44/U/2002 dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- g. Periode kepengurusan Komite Sekolah pada umumnya selama 3 tahun. Bila habis masa jabatan, umumnya dilakukan perpanjangan kepengurusan Komite Sekolah yang sudah ada. Hampir tidak ada orang (yang berhak jadi pengurus: tokoh agama, pendidikan, orangtua siswa, dewan guru, dll.) yang mau menjadi pengurus/anggota Komite Sekolah. Pengurus/anggota Komite Sekolah belum berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan mutu pendidikan.
- h. Pengurus/anggota Komite Sekolah pada umumnya belum pernah mengikuti penataran / workshop / pelatihan tentang pemberdayaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada sebagian pengurus/anggota pernah studi banding ke daerah lain untuk melihat peran dan fungsi Komite Sekolah di Provinsi Riau.
- i. Pada umumnya pengurus/anggota Komite Sekolah belum paham tentang RAPBS yang disusun oleh sekolah. Ketua Komite Sekolah hanya berdiskusi dengan kepala sekolah dan

menandatangani RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah.

- j. Pada umumnya Komite Sekolah belum memiliki AD/ART sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan/program Komite Sekolah sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pengetahuan Pengurus Tentang Tugas dan Fungsi Komite Sekolah



Gambar 3. Pengurus/Anggota Komite Mengikuti Pelatihan

Gambar 3 menunjukkan bahwa dari 57 responden penelitian sebagai pengurus/anggota Komite Sekolah, hanya sebanyak 37 orang (65%) yang pernah mengikuti pelatihan/workshop selama 3 tahun terakhir. Kemudian dari semua responden yang mengikuti pelatihan/workshop, materinya sangat bervariasi mulai dari masalah pembelajaran, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran sampai masalah Komite Sekolah.

Materi yang mendukung untuk pemberdayaan Komite Sekolah hanya 3 orang dari 37 orang, yaitu tentang: Sosialisasi peran dan fungsi komite, MBS dan kemitraan, serta penyusunan RKS. Selainnya materi yang diperoleh anggota/pengurus komite yang mewakili dewan guru berhubungan dengan materi: KBK, CTL, PAKEM, PTK, Bidang Studi, Kepramukaan, Pengembangan diri, dan lainnya.

Responden (pengurus/anggota Komite Sekolah) yang pernah mengikuti pelatihan/workshop, selama tiga tahun terakhir rata-rata mengikuti mengikuti pelatihan sebanyak 2,2 kali. Ini menunjukkan bahwa responden hanya mengikuti pelatihan kurang dari 1 kali per tahun. Kemudian hampir sebagian besar (46,47%) pengurus/anggota Komite Sekolah yang pernah pelatihan, tidak menyebarkan / menyampaikan ilmu / pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan kepada teman atau orang lain. Ini menunjukkan bahwa kurang terjadinya komunikasi dalam struktur organisasi Komite Sekolah.

Sebagian besar pengurus/anggota Komite Sekolah belum paham tentang peran dan fungsinya sebagai mitra sekolah dalam

memajukan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Ini ditunjukkan belum adanya rencana/program kerja Komite Sekolah yang dituangkan pada RKK (Rencana Kerja Komite). Demikian juga masih sebagian kecil Komite Sekolah yang menyusun dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden penelitian ini sebagian besar adalah perwakilan dari Dewan Guru. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan masih didominasi oleh guru. Berdasarkan keadaan ini, menunjukkan bahwa kepengurusan Komite Sekolah belum mampu melaksanakan tugas, peran dan tanggung jawabnya sebagai mitra sekolah dalam memajukan mutu pendidikan. Kepengurusan komite yang didominasi guru, akan membawa dampak kurangnya waktu dan perhatian untuk memajukan pendidikan secara optimal. Hal ini dikemukakan karena guru mempunyai tugas untuk mengajar yang pada umumnya sebagian besar waktu habis untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lebih lanjut kadang guru kekurangan waktu untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik, sehingga kurang waktunya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan melalui peran dan fungsi komite sekolah. Para pengurus Komite Sekolah yang berasal dari perwakilan Dewan Guru cenderung hanya mengikuti dan mensahkan program-program kerja yang telah disusun kepala sekolah.

Kesibukan guru dengan tugas rutin mengajar, membuat waktunya kurang untuk memikirkan tanggungjawab sebagai Komite Sekolah. Lebih lanjut guru pada umumnya banyak berhubungan atau mempunyai relasi dengan guru/pendidik juga sehingga mereka kurang paham tentang keberadaan masyarakat umum termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kondisi demikian membuat program Komite Sekolah kurang mampu berjalan dengan baik, karena belum mampu melihat peluang dalam menggali sumber daya (SDM, tenaga, dan uang) untuk berjalannya program yang telah disusun. Tanpa memiliki sumber daya, maka program-program yang disusun kurang mampu berjalan secara optimal.

Lebih lanjut para pengurus/anggota komite sekolah memiliki pengetahuan dan wawasan yang perlu ditambah lagi. Pengetahuan yang kurang tentang peran dan fungsi Komite Sekolah, membuat pengurus/anggota kurang

optimal dalam menyusun dan menjalankan program. Untuk meningkatkan pengetahuan dan aplikasi dari peran dan fungsi Komite Sekolah, dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau workshop, membentuk tim diskusi antar sesama Komite Sekolah, studi banding pada Komite Sekolah yang sudah mampu berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah, para pengurus/anggota perlu memahami bagaimana cara mengimplementasikannya. Lebih lanjut para pengurus/anggota perlu memahami lebih mendalam materi tentang peran dan fungsinya, agar pada pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa Komite Sekolah mengalami kendala atau hambatan dengan pihak sekolah (kepala sekolah) dalam pelaksanaan peran dan fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terjadi karena komite dan kepala sekolah mempunyai persepsi yang berbeda dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan tidak terjadinya persamaan persepsi serta kesalah pahaman dalam mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diperankan dengan kenyataan. Ini berdampak pada tidak berfungsinya peran dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurus/anggota Komite Sekolah tingkat SMP pada umumnya telah berpendidikan sarjana (S1). Jenis pekerjaan para pengurus/anggota komite sekolah yang menjadi sampel penelitian ini umumnya sebagai guru.
2. Sebanyak 65% pengurus/anggota Komite Sekolah pernah mengikuti pelatihan/workshop dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tetapi yang pernah mengikuti pelatihan/workshop dengan materi pemberdayaan Komite Sekolah hanya 3 orang, dengan materi: sosialisasi peran dan fungsi Komite Sekolah, MBS dan kemitraan sekolah, dan penyusunan RKS.
3. Secara umum pengurus/anggota Komite Sekolah belum memahami tugas, peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) serta bagaimana mengimplementasikannya.
4. Komite Sekolah yang memiliki AD/ART baru sekitar 15%, selebihnya mengacu

pada petunjuk kepala sekolah dan kesepakatan yang disetujui dalam rapat komite.

5. Banyak faktor yang mempengaruhi belum berfungsinya Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi Komite Sekolah, diantaranya dari dalam diri pengurus komite sendiri (pengetahuan, kemauan dan keperdulian) dan luar diri pengurus komite (persepsi masyarakat dan lingkungan sekolah).
Pembinaan melalui pelatihan/workshop pada para pengurus/anggota Komite Sekolah belum mengenai target/sasaran dalam memfungsikan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan saran penelitian ini, dapat dikemukakan rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provinsi hendaknya membuat kebijakan antara lain; membina pengurus/anggota Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan; mengevaluasi kegiatan para pengurus Komite Sekolah untuk mendapatkan gambaran dan sebaran kualitas fungsi Komite Sekolah di Sumatera Utara; dan mengalokasikan dana bagi pembinaan para pengurus/anggota Komite Sekolah yang ada di Sumatera Utara.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hendaknya menyusun suatu perangkat aturan (pelaksanaan) tentang pemberdayaan Komite Sekolah, terutama dalam penyusunan AD/ART, serta meningkatkan pengetahuan pengurus/anggota komite tentang tugas, peran dan fungsi Komite Sekolah melalui berbagai pembinaan seperti pelatihan/workshop.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, agar menjalin kerjasama dengan LPTK dan/atau Lembaga Profesi yang ada di Sumatera Utara untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, melalui pembinaan pengurus/anggota Komite Sekolah.
4. Berbagai pihak/lembaga, agar membuka kerjasama dalam pembinaan Komite Sekolah akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Chan, Sam M. dan Tuti T. Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasballah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kemmis, S. dan R. Mc.Taggart. 1992. *The action research planner*. 3th Edition. Victoria: Deakin University.

Mc.Niff, Jean, 1992. *Action research: principles and practice*. New York: Macmillan Education.

Nasution, N. 1991. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Noe, R. A. 2005. *Employee training and development*. Third Ed. New York: McGraw-Hill International Edition.

Sagala, Syaiful. 2007. *Desain Organisasi Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Press.

Sagala, Syaiful. 2008. *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan. Pemberdayaan Organisasi Pendidikan ke Arah yang Lebih Profesional dan Dinamis di Provinsi/Kota dan Satuan Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.